

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka munculkan otonomi bagi suatu pemerintah daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. (Syamsudin Haris 2007:52) Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, Desentralisasi akhir – akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintah karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintah di Indonesia.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Menurut Haris, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.(Syamsudin Haris, 2007:39)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:992) otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan undang-undang No 32 tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan undang-undang No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut: “otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal di suatu daerah untuk mengatur, dan mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusan sendiri dengan menghormati peraturan perundang uandangan yang berlaku. (Hanif Nurcholis, 2007:30) Kewenangan otonomi daerah ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu otonomi luas dan otonomi terbatas. Kewenangan Otonomi luas menurut Haris adalah kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. (Syamsudin Haris, 2007:51)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.2 Pemerintah Daerah

Pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik, dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik, dan berdaulat melalui adat istiadat, intuisi, dan hukum dalam sebuah negara. Dalam pemahaman yang luas pemerintahan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah kesatuan. Konsep ini telah ditetapkan sebagai pilihan penyelenggaraan pemerintah negara republik indonesia. Dalam hal ini keberadaan pemerintah daerah di indonesia sudah dikenal sejak zaman dahulu ketika pemerintahan kerajaan dilaksanakan oleh nenek moyang kita. Ketika memasuki masa penjajahan kolonialisme Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris, maupun Jepang. Pemerintahan daerah pun tetap dilaksanakan dalam konteks yang berbeda. Hal tersebut telah semakin menguatkan posisi dan kedudukan pemerintah daerah menjadi demikian penting dalam tatanan pemerintah indonesia. (Kuswandi,2009:3)

Berdasarkan mengenai pemerintah daerah, yang diatur dalam pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi:

Pembagian daerah indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-asul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Sedangkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2, definisi pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan penyelenggaraan sistem pemerintah di daerah tidak dapat dihindari karena pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah, selain itu terdapat pemerintah pusat yang berkewajiban melayani pembangunan baik dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan pemerintah pusat sendiri. (Awang, Wijaya, 2011: 11)

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam pasal 9 urusan pemerintahan yaitu:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
2. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
3. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
5. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Selanjutnya pasal 10 tentang urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. melaksanakan sendiri; atau
- b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Kemudian telah dijelaskan juga dalam pasal 11 tentang urusan pemerintahan konkuren ada 3 (tiga) yaitu:

1. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan;
2. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
3. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 12 bahwasanya:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
- a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;
  - d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. perhubungan;
  - j. komunikasi dan informatika;
  - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. penanaman modal;
  - m. kepemudaan dan olah raga;
  - n. statistik;
  - o. persandian;
  - p. kebudayaan;
  - q. perpustakaan;
  - r. kearsipan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pariwisata;
  - c. pertanian;
  - d. kehutanan;
  - e. energi dan sumber daya mineral;
  - f. perdagangan;
  - g. perindustrian; dan
  - h. transmigrasi.

### 2.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perkebunan serta dapat melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada daerah dalam rangka desentralisasi.

Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan lingkup pengembangan perkebunan, sarana dan prasarana, peningkatan produksi perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perkebunan lingkup pengembangan perkebunan, sarana dan prasarana,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan produksi perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perkebunan lingkup pengembangan perkebunan, sarana dan prasarana, peningkatan produksi perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (Sumber Dinas Perkebunan)

## **2.4 Pemberdayaan Masyarakat**

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya (kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya. (Sulistiyani, 2004: 77)

Sedangkan dalam pengertian lain yaitu: “Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumberdaya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya didalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus menerus, proses partisipatif dimana anggota masyarakat bekerjasama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama”. Mengacu pada pengertian dan teori para ahli diatas, dalam penelitian ini pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya membangkitkan kesadaran akan potensi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya sehingga masyarakat dapat mencapai kemandirian. (Moh. Ali Aziz, dkk 2005:136)

Pemberdayaan juga memiliki beberapa definisi yang dapat dilihat dari tujuan proses, dan cara-cara pemberdayaan. (Edi, 2009-58-59)

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupan.
3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi yang berkembang pesat diarahkan agar kehidupan mampu menguasai (berkuasa).

Pemberdayaan adalah mengembangkan potensi ekonomi rakyat, hakekat, dan martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya sehingga tatanan nilai budaya setempat. (Sedarmayanti dalam Ummitun, 2005:22)

Sedangkan menurut Stewart (dalam Chandra,2006:11) pemberdayaan adalah cara memberi delegasi tempat dimana kekuasaan yang nyata dapat digunakan secara efektif, delegasi bukan hanya dalam bentuk tugas tapi juga pembuatan keputusan serta tanggung jawab yang penuh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Masyarakat juga merupakan kelompok atau kolektifitas manusia yang melakukan antar hubungan, kurang lebih bersifat tahan lama berlandaskan perhatian dan tujuan bersama serta telah melakukan jaringan secara berkesinambungan dalam waktu lebih relatif lama.

Tim Deliveri dalam kutipan Totok Mardikanto dan Poerwoko soebianto (2017:76) Pemberdayaan masyarakat yaitu, pemberdayaan sebagai suatu proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf kehidupannya sendiri dengan mengakses sumberdaya setempat sebaik mungkin.

Sedangkan menurut Paul, yang dikutip oleh Yogi Suprayogi Subandi (2011:180) mengatakan bahwa pemberdayaan berarti pembangian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran poliotik dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta mempengaruhi mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat di pengaruhi oleh beberapa indikator, diantaranya indikator-indikator tersebut adalah:

1. Sosialisasi kegiatan

Sosialisasi kegiatan yaitu upaya mengkomunikasikan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan diwilayah tersebut. Termasuk dalam sosialisasi kegiatan, perlu juga di kemukakan tentang pihak-pihak terkait yang akan diminta partisipasi keterlibatannya, pembagian peran yang diharapkan, pendekatan, strategi serta langkah-langkahyang akan dilakukan. (Totok Mardikanto, 2017:128)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 2. Penyadaran Masyarakat

Penyadaran masyarakat dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang keberadaannya, baik sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun kondisi lingkungannya yang menyangkut lingkungan fisik/teknis, sosial-budaya, ekonomi dan politik.

Termasuk dalam penyadaran adalah:

- a. Bersama-sama masyarakat melakukan analisis keadaan yang menyangkut potensi dan masalah, serta analisis faktor-faktor penyebab terjadinya masalah yang menyangkut kelemahan internal dan ancaman eksternalnya.
- b. Melakukan analisis akar masalah, analisis alternatif pemecahan masalah, serta pilihan alternatif pemecah terbaik yang dapat dilakukan.
- c. Menunjukkan pentingnya perubahan untuk memperbaiki keadaannya, termasuk merumuskan prioritas perubahan, tahapan perubahan, cara melakukan dan mencapai perubahan, sumberdaya yang diperlukan, maupun peran bantuan (modal, teknologi, manajemen, kelembagaan, dll) yang diperlukan. (Totok Mardikanto, 2017:128)

## 3. Pengorganisasian masyarakat

Pengorganisasian masyarakat ini termasuk pemilihan pemimpin kelompok-kelompok tugas (*task Grup*) yang akan dibentuk. Pengorganisasian masyarakat ini penting dilakukan, karena untuk



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan perubahan guna memecahkan masalah dan atau memperbaiki keadaan seringkali tidak dapat dilakukan individu (perorangan), tetapi diperlukan pengorganisasian masyarakat. (Toto Maedikanto, 2017:128-129)

**4. Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan berbagai pelatihan untuk menambah dan atau memperbaiki pengetahuan teknis, keterampilan manajerial serta perubahan sikap/wawasan. Selanjutnya dengan pengembangan kegiatan, utamanya yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan serta perlindungan, pelestarian dan perbaikan/rehabilitas sumberdaya alam, maupun pengembangan efektivitas kelembagaan. Kegiatan peningkatan pendapatan merupakan upaya terpenting untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang diperlukan maupun untuk peningkatan posisi tawar dan membangun kemandirian. Peningkatan pendapatan juga memiliki arti penting agar masyarakat semakin yakin bahwa peran bantuan yang diberikan benar-benar mampu memperbaiki kehidupan minimal secara ekonomi.

(Totok, mardikanto 2017:129)

**2.5 Petani Kelapa**

Petani merupakan pelaku utama dalam kegiatan pertanian. Soetrisno (2002), dalam sosiologi barat, terdapat dua konsep mengenai petani, yaitu *peasant* dan *farmers*. *Peasant* merupakan petani yang sebagian besar hasil pertaniannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. *Farmers* adalah orang-orang yang hidup dari pertanian dan memanfaatkan sebagian



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar hasil pertanian untuk dijual. Dalam definisi lain petani sebagai seorang pencocok tanam yang produksinya terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumsi keluarga. Petani di Kecamatan Tempuling sebagian besar merupakan petani penggarap yang mengusahakan tanaman pertanian yang hasilnya untuk tujuan dijual maupun dikonsumsi sendiri. Petani yang berada di kabupaten Indragiri Hilir Ini merupakan Petani Kelapa.

## **2.6 Pemberdayaan Dalam Prespektif Islam**

Secara pribadi, manusia merupakan makhluk individual, tetapi dalam kenyataannya, sejak manusia lahir, sebenarnya menunjukkan makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Secara ekstrim, manusia tidak bisa dipisahkan dari keluarganya, familinya, masyarakatnya, dan kelompoknya. Manusia selalu mempunyai hasrat untuk hidup bersama dengan manusia lain. Hasrat hidup bersama adalah untuk memenuhi beberapa kebutuhan-kebutuhan yang bisa membawa kepuasan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus menghadapi kekuatan alam. Ada pola tradisional untuk yang bersifat menyerah dan semata-mata bertindak dalam batas-batas untuk melindungi dirinya. Sedangkan masyarakat modern dalam menghadapi kekuatan alam sudah bersifat agresif, yaitu mengelola dan memanfaatkan alam

Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi tetapi dia mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial sehingga sampai tahap bahwa kekayaan negara yang dimiliki tidak hanya dinikmati oleh sekelompok masyarakat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu saja, melainkan dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Islam mengakui kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu sama lain, bukan saling bersaing dan bertentangan antar mereka.

Sebagai Khalifah dimuka bumi ini, manusia ditugaskan Allah SWT mengelola langit dan bumi beserta isinya untuk kemaslahatan umat. Namun di tegaskannya tdak akan ada yang di peroleh manusia kecuali hasil usahanya sendiri. Kebenaran prinsip tersebut bersumberv dari firman Allah SWT:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

“Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebageian kamu atas sebageian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang di berikan-Nya, dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(QS.Al-an’am(6):165)

Dalam ayat diatas jelas dikatakan bahwa Allah lah yang menjadikan manusia sebagai penguasa di muka bumi ini, dengan tujuan untuk menguji manusia dengan apa yang di berikan Allah yang di miliki manusia agar dapat menjaganya. Namun apabila manusia tidak dapat menjaga apa yang di berikan-Nya sesungguhnya siksaan-Nya berlaku dengan cepat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Khairul Ihwan (2013), yang dilakukan penelitian dengan judul **“USULAN STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA SKALA IKM DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”**. Mayoritas penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengandalkan perkebunan kelapa sebagai penghasilan utama. Mereka menjual kelapa dalam bentuk kelapa bulat dan kopra dengan harga yang relatif rendah sehingga tidak mampu memberikan kehidupan yang layak. Hal ini semakin bertambah karena tingkat produktifitas perkebunan kelapa rendah dan sistem niaga yang kurang menguntungkan petani. Sementara di daerah lain kelapa merupakan komoditas yang dapat diolah menjadi berbagai macam produk yang bernilai tinggi dengan teknologi sederhana yang dapat dilakukan oleh industri kecil dan menengah. Sehingga diperlukan strategi pengembangan industri pengolahan kelapa skala IKM yang mampu meningkatkan pendapatan petani kelapa di Kabupaten Inhil. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode Analisis SWOT menghasilkan 23 alternatif strategi pengembangan industri pengolahan kelapa skala IKM di Kabuapten Inhil yaitu 3 strategi SO, 9 strategi WO, 7 strategi ST, 4 strategi WT. Berdasarkan hasil pembobotan menggunakan metode Analytical Network Process (ANP) pada setiap alternatif strategi, Strategi SO2 yaitu “Memberikan jaminan pembelian produk-produk yang diproduksi oleh masyarakat atau IKM oleh pemerintah dan pemerintah harus menyiapkan industri pengolahan lanjut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

guna meningkatkan kualitas atau standar yang diminta pasar terhadap produk yang di hasilkan oleh masyarakat/ IKM” merupakan strategi prioritas dalam pengembangan pengembangan industri pengolahan kelapa skala IKM di Kabupaten Inhil.

Selanjutnya penelitian yang sama yang dilakukan oleh Kiki Satria (2015), yang melakukan penelitian dengan judul **“NEGARA DAN PETANI (STUDI KASUS PEMIHAKAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TERHADAP PETANI KELAPA)”**.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi Penelitian di Indragiri Hilir fokus penelitian di Departemen Perkebunan Indragiri Hilir. Sektor perkebunan adalah salah satu tulang punggung perekonomian Indragiri Hilir. Berbagai tanaman perkebunan yang telah dikembangkan selama ini adalah lokal kelapa, kelapa hibrida, kelapa sawit, karet, kopi, coklat dan kacang. Dari berbagai macam komoditas, minyak lokal sangat bagus. Potensi hasil perkebunan di Produksi minyak hilir Indragiri mencapai 390.924,28 ton per tahun dengan lahan seluas 295.380,24 hektar. Dengan potensi ini menjadikan Indragiri Hilir terdaftar sebagai satu wilayah minyak terbesar di dunia, bahkan dijuluki sebagai "Land of Coconut Overlay Dunia ". Potensi lahan untuk pengembangan komoditas perkebunan adalah seluas 722.806 ha. Dan telah digunakan sekitar 600.691 ha. Sebagai pemilik perkebunan sawit terbesar di dunia, Indonesia memiliki areal perkebunan seluas 3,7juta hektar yang tersebar di telapak tangan pulau-pulau. Kateman atau lebih dikenal dengan daerah blunt River adalah Distrik yang memiliki



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkebunan kelapa paling luas di sana. Kebun dimiliki oleh PT. Pulau Sambu, sebuah perusahaan agribisnis yang memiliki kebun sekaligus di telapak tangan pabrik minyak Indragiri Hilir. Meskipun perkebunan kelapa (kopra) di Inhil dikelola dengan baik oleh para pekebun, tetapi pemasaran kelapa sawit berfluktuasi sehingga posisi tawar petani adalah sangat rendah dalam menentukan harga, karena mereka bergantung pada pembelian oleh perusahaan. Ini karena terlalu Kabupaten Inhil memberi kebebasan kepada perusahaan terlibat dalam kelapa untuk membuat kebun Anda sendiri, untuk pasokan bahan baku industri bahan. Jadi ketika perusahaan sudah bisa 'mandiri' dengan tanaman mereka sebagai mentah material, mereka akan menekan harga beli petani kelapa. Sebagai hasil dari monopoli dalam harga pasar minyak ini menjadi tidak stabil, bahkan sering kurang lancar. Hal ini disebabkan oleh ketidakberpihakan Pemerintah Indragiri Hilir sehingga kehidupan petani di Indragiri Hilir tidak membaik.

Selanjutnya penelitian yang sama yang dilakukan oleh Nuryanti (2015), yang melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS FLUKTUASI HARGA KELAPA TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (Studi Kasus di Kecamatan Enok, Kecamatan Gaung, Kecamatan Kateman, Kecamatan Keritang, dan Kecamatan Mandah)**. Fluktuasi harga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir mempengaruhi tingkat pendapatan petani kelapa. Realisasi dilihat dari harga buah kelapa pada tahun 2010-2012, harga kelapa naik signifikan, kemudian pada 2012-2013 harga kelapa turun



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

signifikan. Hal ini berdampak pada pendapatan petani kelapa yang tidak stabil sehingga menurunkan pendapatan masyarakat hilir Indragiri. Salah satu kendala dalam meningkatkan pendapatan petani adalah posisi tawar petani yang lemah dibandingkan dengan pedagang. Ini karena sistem pasar di tingkat petani adalah monopsoni. Faktor mempengaruhi fluktuasi harga kelapa yaitu; Harga perusahaan, permintaan pasar menurun untuk kelapa, menurunnya kualitas dan kuantitas produk kelapa. Tindakannya adalah mengelola kelapa, mengurangi pengeluaran rumah tangga, pemerintah memberikan panduan untuk menangani minyak kelapa menjadi virgin coconut oil (VCO) dan braket arang, dan peremajaan kelapa. Upaya masyarakat selanjutnya adalah pembentukan koperasi petani dan menyarankan pemerintah untuk mendirikan pabrik kelapa di hilir Kabupaten Indragiri. monopsoni tidak sesuai dengan konsep ekonomi Islam. Karena itu salah satu syarat dan pilar penjualan dan beli pasti ada kesenangan antara penjual dan pembeli. Dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 "Allah membenarkan penjualan dan membeli dan melarang riba" dan surat An-Nisa ayat 29-30 "Jangan makan harta satu sama lain di jalan kesia-siaan, kecuali dengan cara perdagangan yang berlaku sama seperti diantara kalian".

## 2.8 Definisi Konsep

Untuk memperjelas atau menghindari kesalah pahaman beberapa konsep atau istilah pada penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan konsep tersebut dengan mengoprasionalkan batasan sebagai beriku:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Desentralisasi Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip negara kesatuan.
4. Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perkebunan serta dapat melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada daerah dalam rangka desentralisasi
5. Pemberdayaan masyarakat yaitu, pemberdayaan sebagai suatu proses Yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf kehidupannya sendiri dengan mengakses sumberdaya setempat sebaik mungkin.
6. Petani adalah orang orang yang hidup dari pertanian dan memanfaatkan sebagian besar hasil pertanian untuk dijual;

## 2.9 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan penulis dalam menentukan indikator-indikator penelitian. Indikator yang digunakan penulis dapat dilihat dari tabel.

**Tabel 2.1**  
**Indikator Penelitian**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat	1. Sosialisasi kegiatan	- Memberikan penyuluhan kepada masyarakat petani kelapa
	2. Penyadaran Masyarakat	- Menginformasikan kepada masyarakat petani akan pentingnya pengolahan hasil panen
	3. Pengorganisasian masyarakat	- Pembentukan kelompok tani
	4. Pelaksanaan Kegiatan	- Melakukan pelatihan-kepada masyarakat

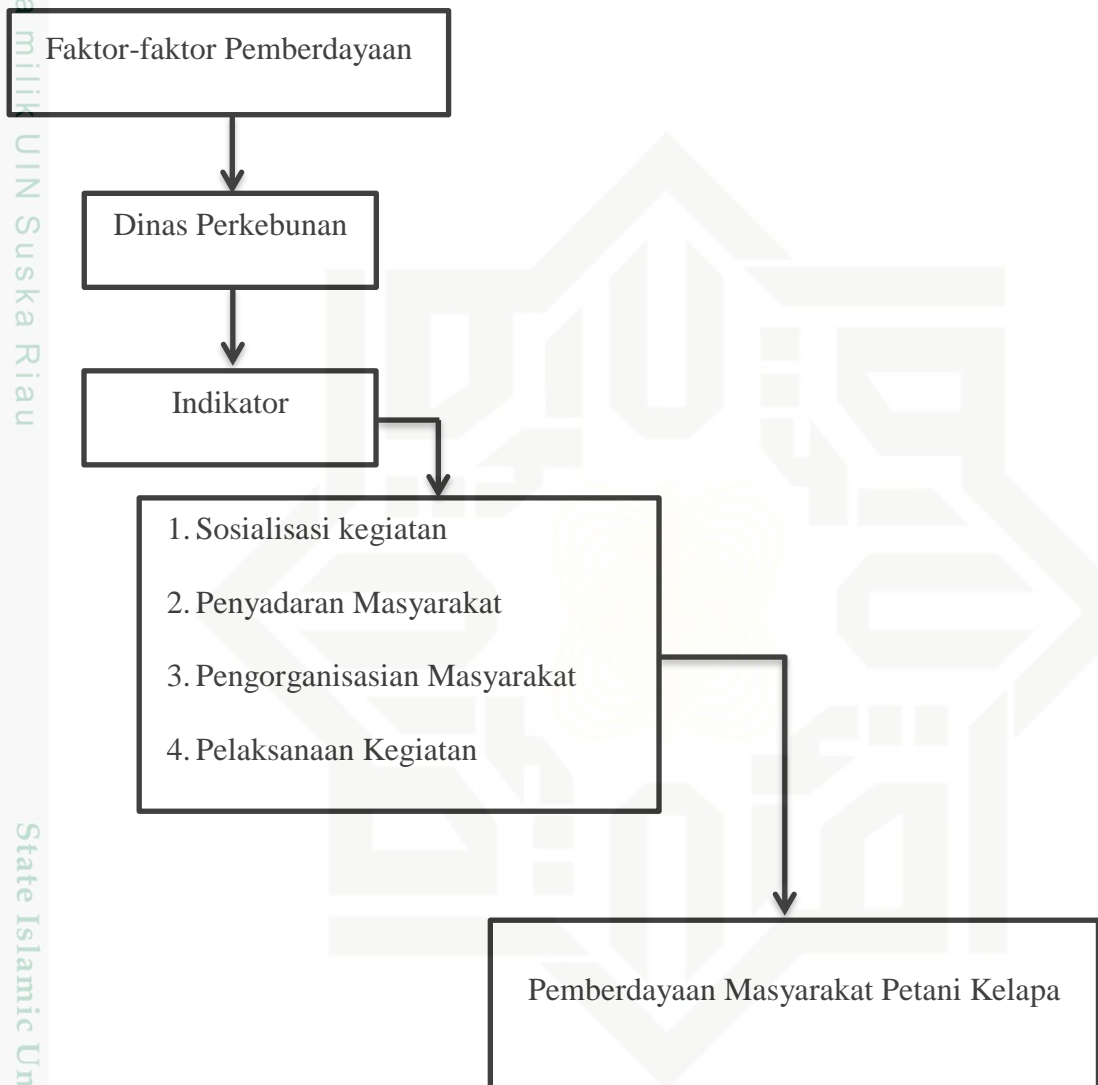
*Sumber, Totok:2012Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*

## 2.10 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah teori yang digunakan dalam berargumentasi dengan menggunakan argumentasi-argumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan. Dalam menyusun suatu kerangka berfikir penulis memilih teori yang relevan atau saling terkait. Adapun kerangka berfikir dapat dilihat dari bagan di bawah ini:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.